Pengembangan Modul Assesmen Bimbingan dan Konseling Non-Tes

Eko Sujadi¹, Hadi Chandra², Lia Angela, Nur Wisma³

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci ^{1,2} Universitas Sriwijaya e-mail: ekosujadi91@gmail.com

Abstract. As one of the educators in the education unit, the counselor has a major role in facilitating students to achieve their developmental tasks. Therefore, counselors must have skills in implementing counseling services. The aim of this study is to produce a non-test assessment module for junior high school guidance and counseling teachers in Sungai Penuh and Kerinci District. This research is a research development (development research). Data collection instruments in this study were questionnaires. The data analysis technique used is descriptive data analysis and Kendall Concordance Coefficient (W) test. The findings of this study include: 1) there are differences in the skills of carrying out non-test assessments between BK Teachers in Pekanbaru City and Kerinci District; 2) the module to improve the teacher's guidance and counseling skills in carrying out the non-test assessment is considered feasible; and 3) the level of use of the teacher's guidance and counseling skills improvement module in carrying out the non-test assessment was highly rated.

Keywords: Development, Modules, Assessment

Abstrak. Sebagai salah satu pendidik yang berada di satuan pendidikan, konselor memiliki peran besar dalam memfasilitasi siswa mencapai tugas-tugas perkembangannya. Oleh sebab itu, konselor harus memiliki keterampilan dalam pelaksanaan pelayanan konseling. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan modul assesmen non tes bagi guru bimbingan dan konseling yang tingkat SMP di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (development research). Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif dan uji Koefisien Konkordansi Kendall (W). Temuan penelitian ini antara lain: 1) terdapat perbedaan keterampilan melaksanakan assesmen non tes antara Guru BK di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kerinci; 2) modul peningkatan keterampilan Guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan assesmen non tes dinilai layak; dan 3) tingkat keterpakaian modul peningkatan keterampilan Guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan assesmen non tes dinilai tinggi.

Kata kunci: Pengembangan, Modul, asesmen non-tes

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu pendidik yang berada di satuan pendidikan, Konselor memiliki peran besar dalam memfasilitasi siswa mencapai tugas-tugas perkembangannya. Oleh sebab itu, Konselor harus secara aktif meningkatkan kompetensi dirinya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 10 ayat 1 memaparkan beberapa kompetensi yang harus dimiliki pendidik, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Secara terperinci, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 menjelaskan bahwa kompetensi utuh Konselor mencakup kompetensi akademik dan profesional. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah dari pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan konseling. Kompetensi akademik dan profesional Konselor secara terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keseluruhan kompetensi yang diperoleh oleh Konselor tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Pasca dikeluarkannya kebijakan mengenai implementasi kurikulum 2013 pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, ditanggapi secara bijak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menyusun pertunjuk atau pedoman pelayanan bimbingan dan konseling berbasis kurikulum 2013, yakni Permendkibud No 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum dan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang pelayanan Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Kebijakan-kebijakan ini tentunya telah didasarkan atas aspek pertimbangan secara teoritis dan praktis terhadap upaya penguatan eksistensi pelayanan bimbingan dan konseling di Indonesia.

Pada Salinan Lampiran Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014, dikatakan bahwa Bimbingan dan Konseling diselenggarakan oleh tenaga pendidik profesional yaitu Konselor atau Guru bimbingan dan konseling yang berkualifikasi akademik Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor dari Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan yang terakreditasi. Pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh guru Bimbingan dan Konseling meliputi keseluruhan spektrum pelayanan konseling yang terdiri dari komponen program, bidang layanan, struktur dan program layanan, kegiatan dan alokasi waktu layanan yang didasarkan atas aspek fungsi, tujuan, asas, prinsip dan landasan bimbingan dan konseling. Mengingat kompleksnya pelayanan bimbingan dan konseling yang selalu mengikuti perkembangan kurikulum, menuntut guru BK untuk dapat memperbaharui dan meningkatkan kompetensi yang telah dimilikinya.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memfasilitasi guru Bimbingan dan Konseling untuk meningkatkan kompetensinya sebenarnya sudah berjalan, seperti mengadakan pelatihan, diklat, pembuatan modul pembelajaran, dan sebagainya. Namun demikian, mengingat luasnya cakupan wilayah Indonesia, banyaknya guru BK serta terbatasnya fasilitas yang dimiliki, mengakibatkan program-program tersebut belum cukup banyak memberikan perubahan yang signifikan pada pengembangan kompetensi. Permasalahan ini kemudian ditambah lagi oleh rendahnya motivasi guru BK untuk mengembangkan diri secara mandiri.

Permasalahan seperti ini juga terjadi di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kerinci, khususnya bagi guru Bimbingan dan Konseling tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa Guru bimbingan dan konseling di 2 (dua) kota tersebut, ditemukan masih ada guru BK yang tidak menguasai konsep teoritis dan praksis bimbingan dan konseling, terlebih lagi apabila dikaitkan dengan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Pendidikan Dasar dan Menengah. Permasalahan ini kemudian berkembang semakin kompleks dengan adanya "Guru bimbingan dan konseling" yang bukan berlatar belakang Pendidikan Bimbingan dan Konseling. Tentunya, praktisi dengan karakterisitk yang demikian perlu diberikan bimbingan secara intensif terkait dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan.

Apabila dikaitkan dengan Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, nampaknya keadaan Guru bimbingan dan konseling di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kerinci masih jauh dari harapan. Kasus yang sering peneliti amati yakni terjadinya plagiat program bimbingan dan konseling yang seharusnya melalui serangkaian kegiatan need assessment, kemudian ditambah dengan ketidakmampuan beberapa guru bimbingan dan konseling untuk melaksanakan program bimbingan dan konseling. Perilakuperilaku seperti ini yang kemudian melahirkan pandangan-pandangan negatif stakeholder's maupun siswa sebagai pengguna, bahwa guru bimbingan dan konseling tidak memiliki tugas pokok yang jelas. Suastini & Yudana (2013) juga mengemukakan melalui hasil penelitiannya, bahwa terdapat kesenjangan antara kompetensi profesional guru BK berbasis Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008.

Dalam lingkup yang lebih sempit, khususnya mengenai assesmen, juga ditemukan permasalahan-permsalahan yang serius. Berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti terhadap beberapa Guru bimbingan dan konseling di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kerinci, masih banyak guru BK yang tidak melaksanakan kegiatan assesmen. Beberapa faktor penyebabnya di antaranya: 1) assesmen bimbingan dan konseling cukup banyak dan selalu

berkembang sehingga menuntut praktisi di lapangan untuk menguasainya. Namun permasalahannya tidak semua guru BK di Kabupaten Kerinci yang mampu menggunakan assessmen tersebut dengan baik; 2) assesmen BK membutuhkan waktu yang lama dalam pengolahannya, terlebih apabila dilakukan secara manual. Bagi guru-guru BK yang muda/fresh graduate tidak menghadapi kendala yang berarti, namun bagi guru-guru BK senior, penggunaan alat bantu berupa aplikasi computer tidak dikuasai oleh mereka; 3) letak Kabupaten Kerinci yang jauh dari Ibu kota Provinsi berdampak pada sedikitnya kegiatan-kegiatan keilmuan yang diselenggarakan; 4) kurangnya motivasi guru BK untuk mengembangkan diri, terutama terkait dengan kompetensi menggunakan instrumentasi; 5) pada beberapa instrumen membutuhkan dana dalam pelaksanaannya, seperti biaya menyusun instrumen, foto copy, dan lain sebagainya, namun sekolah tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk penyelenggaraan pelayanan konseling di satuan pendidikan.

Berbagai upaya pengentasan masalah yang timbul akibat rendahnya kompetensi guru Bimbingan dan Konseling, terutama terkait dengan keterampilan memanfaatkan assesmen dapat dilakukan, salah satunya melalui kegiatan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK). Firman (2016) mengemukakan peran MGMP antara lain: 1) melaksanakan pengembangan wawasan, pengetahuan dan kompetensi, sehingga memiliki dedikasi yang tinggi; dan 2) melakukan refleksi diri ke arah pembentukan profil guru yang profesional. Selanjutnya menurut Direktorat Profesi Pendidik (2008), tujuan MGMP dua di antaranya yakni: 1) memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar, dsb; dan 2) mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja (meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja) dan mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme di tingkat KKG/MGMP. Beberapa hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa kegiatan Musyawarah Guru berperan aktif dalam peningkatan kompetensi (Mustofa, 2007; Ridwan, 2014; Handayani, 2016; Sulaeman, 2015).

Khusus bagi Guru bimbingan dan konseling tingkat SMP di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci sebenarnya telah memiliki wadah Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) yang bertujuan memfasilitasi Guru bimbingan dan konseling dalam mengembangkan kompetensi. Namun yang menjadi permasalahannya, yakni; 1) pertemuan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling belum terlaksana secara rutin dan terjadwal; 2) belum tersusunnya pola pelatihan yang tepat kepada guru BK untuk peningkatan kompetensinya; 3) kurangnya tenaga ahli bimbingan dan konseling yang dapat memberikan pelatihan kepada guru

BK SMP se Kabupaten Kerinci; dan 4) kurangnya minat guru Bimbingan dan Konseling untuk terlibat dalam kegiatan MGBK; 5) tidak adanya pedoman seperti modul dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan. Oleh sebab itu, kegiatan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling tingkat SMP Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kerinci tidak berjalan sesuai dengan harapan. Begitu pula halnya dengan penelitian yang dilakukan Onate & Loekmono (2016) bahwa evaluasi konteks (context) program MGBK SMP/MTs menunjukkan bahwa dalam penentuan visi, misi dan tujuan program MGBK SMP/MTs berada dalam kategori kurang baik.

Di dalam Standar Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) (2008) dijelaskan sedikitnya ada empat faktor yang menyebabkan kinerja KKG/MGMP tidak mengalami peningkatan secara merata. Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan KKG/MGMP menggunakan pendekatan education production function atau input-output analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Faktor kedua, penyelenggaraan KKG/MGMP yang dilakukan masih belum dapat melepaskan dari sistem birokrasi pemerintah daerah, sehingga menempatkan KKG/MGMP sebagai wadah pengembangan profesionalisme guru masih tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang- kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kebutuhan guru setempat. Faktor ketiga, akuntabilitas kinerja KKG/MGMP selama ini belum dilakukan dengan baik. Pengurus KKG/MGMP tidak memiliki beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada sesame rekan guru, pimpinan sekolah, dan masyarakat. Faktor keempat, belum adanya panduan/ petunjuk kegiatan kelompok kerja yang jelas untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi guru dan pengurus KKG/MGMP dalam melakukan aktivitas kelompok kerja atau musyawarah kerja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana kompetensi Guru BK Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan assesmen bimbingan dan konseling non tes?; 2) apakah terdapat perbedaan kompetensi dalam melaksanakan assesmen bimbingan dan konseling non tes antara guru bimbingan dan konseling di Kota Pekanbaru dan Kota Sungai Penuh?; 3) bagaimana tanggapan para ahli terhadap modul assesmen non tes bagi Guru bimbingan dan konseling yang dikembangkan?; dan 4) bagaimana tanggapan guru Bimbingan dan Konseling tingkat SMP se Kabupaten Kerinci terhadap modul assesmen non tes yang dikembangkan?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (development research). Dalam penelitian ini dikembangkan sebuah modul Assesmen non Tes yang diharapkan dapat menjawab permasalahan di lapangan terkait dengan rendahnya kompetensi guru BK dalam menggunakan assesmen non tes. Berdasarkan karakteristik dari beberapa model yang ada, peneliti cenderung memilih model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation) sebagai acuan dalam penelitian ini, karena model ADDIE memakai dasar-dasar bersifat umum, sistematis dan kerangka kerjanya bertahap sehingga setiap elemen memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Uji coba produk dilakukan tiga kali yaitu: (1) uji ahli, (2) uji terbatas dilakukan terhadap kelompok kecil sebagai pengguna produk, dan (3) uji lapangan (field testing). Desain uji coba produk pengembangan biasanya dilakukan melalui tiga tahap yaitu: uji perseorangan, uji kelompok kecil, dan uji lapangan. Dalam penelitian ini, kegiatan pengembangan produk yang dilakukan peneliti hanya sampai pada tahap uji kelompok kecil. Pertimbangan peneliti melakukan pengembangan produk hingga tahap uji kelompok kecil yaitu untuk menghasilkan prototype produk (modul) yang telah memenuhi kriteria hasil validasi para ahli dan memenuhi kriteria keterpakaian oleh guru BK dalam kegiatan Musywarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK). Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakteristik data dan subjek penelitian. Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kuesioner yang dikembangkan sendiri oleh peneliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif, yakni dengan mendeskripsikan validitas dan keterpakaian modul asesemen non tes. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hasil penilaian berkenaan dengan produk penelitian yang dikembangkan, maka dilakukan uji Koefisien Konkordansi Kendall (W).

TEMUAN

Berdasarkan verifikasi terhadap data penelitian, seluruh data yang diperoleh dari hasil pengadministrasian terhadap Guru bimbingan dan konseling yang layak diolah yaitu sebanyak 78 data, dengan rincian 46 Guru BK di Kota Pekanbaru dan 32 Guru BK di Kabupaten Kerinci.

Deskripsi mengenai keterampilan assesmen non tes Guru BK di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. Distribusi Frekuensi dan Kategori Skor Keterampilan Guru BK di Kota Pekanbaru dalam Melaksanakan Assesmen

Kategori	Frekuensi (F)	Persentase (%)	
Sangat Tinggi (ST)	0	0	
Tinggi (T)	9	19,565	
Sedang (S)	37	80,435	
Rendah (R)	0	0	
Sangat Rendah (SR)	0	0	
Total	46	100	

Dari Tabel 1 di atas terlihat bahwa dari jumlah keseluruhan sampel yang berjumlah 46 Guru BK, sebagian besar keterampilan assesmen non tesnya berada pada kategori sedang (S) dengan jumlah frekuensi 37 Guru BK atau dapat dipersentasekan dengan nilai 80.435%. Selanjutnya disusul pada kategori tinggi (T) dengan jumlah frekuensi 9 Guru BK yang dapat dipersentasekan dengan nilai 19.565%. Sedang tidak terdapat Guru BK yang berada pada kategori rendah (R), sangat rendah (SR) dan sangat tinggi (ST). Pada keseluruhan indikator, Guru BK berada pada kategori sedang (S), dengan skor maksimal yang dicapai sebesar 106 dari skor ideal 150. Skor terendah keseluruhan adalah 80, skor total 4287, rata-rata skor 93.196.

Deskripsi mengenai keterampilan assesmen non tes Guru BK di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. Distribusi Frekuensi dan Kategori Skor Keterampilan Guru BK di Kabupaten Kerinci

Kategori	Frekuensi (F)	Persentase (%)	
Sangat Tinggi (ST)	0	0	_
Tinggi (T)	0	0	
Sedang (S)	32	100	
Rendah (R)	0	0	
Sangat Rendah (SR)	0	0	
Total	32	100	

Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa dari jumlah keseluruhan sampel yang berjumlah 32 Guru BK, sebagian besar keterampilan assesmen non tesnya berada pada kategori sedang (S) dengan jumlah frekuensi 32 Guru BK atau dapat dipersentasekan dengan nilai 100%. Sedangkan tidak terdapat Guru BK yang berada pada kategori rendah (R), sangat rendah (SR), tinggi (T), dan sangat tinggi (ST). Pada keseluruhan indikator, Guru BK berada pada kategori sedang (S), dengan skor maksimal yang dicapai sebesar 97 dari skor ideal 150. Skor terendah keseluruhan adalah 87, skor total 2876, rata-rata skor 89.875.

Agar dapat digunakan statistik parametrik, data yang diperoleh dari lapangan harus lulus uji normalitas dan homogenitas. Pengujian normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov - Smirnov dengan koreksi Liliefors, menggunakan ketetapan alpha (α) 0.05. Asym Sig Guru BK di Pekanbaru 0,216 dan Kerinci 0,684. Keseluruhan Asymp.Sig lebih besar dari 0.05, ini berarti data

Keterampilan Guru Bimbingan dan Konseling Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kerinci dalam Melaksanakan Assesmen non Tes berdistribusi normal.

Untuk uji homogenitas, nilai signifikansi 0,073 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian data keterampilan Guru bimbingan dan konseling Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan assesmen non tes homogen.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisa t-test. Berdasarkan analisa tersebut, diperoleh hasil perhitungan seperti yang terangkum pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Hasil Perhitungan T-Test

		ne's Test Equality	of			
Variabel	Varia	t-test for Equality of Means				
		•		•	Sig. (2-	Mean Difference
	F	Sig.	t	df	tailed)	
Equal variances assumed	3.308	0.073	2.363	76	.021	3.321
Equal variances not assumed			2.530	75.942	.013	3.321

Berdasarkan Tabel 3 dapat terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0.013 atau probabilitas di bawah 0.05 ($0.013 \le 0.05$). Dengan demikian maka terdapat perbedaan keterampilan Guru bimbingan dan konseling Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kerinci.

Setelah diperoleh gambaran keterampilan melaksanakan asesmen pada guru BK di pekanbaru dan Kabupaten Kerinci, selanjutnya peneliti melakukan pengembangan modul asesmen non tes. Pengembangan mempedomani pola ADDIE yaitu (1) tahap analisis, (2) tahap desain, (3) tahap pengembangan, (4) tahap implementasi, dan (5) tahap evaluasi.

Tabel 4. Data Hasil Validasi Ahli

NT A 1			Skor Ahli			D.	0./	TZ .
No	Aspek	A	В	С	Σ	Rata -rata	%	Kategori
1	Tampilan/ daya tarik modul	21	20	21	62	20,67	82,67	Sangat Layak
2	Langkah-langkah pelaksanaan modul	9	8	10	27	9	90,00	Sangat Layak
3	Peran guru BK atau Konselor	8	8	9	25	8,33	83,33	Sangat Layak
4	Materi modul	39	38	42	119	39,67	88,15	Sangat Layak
5	Pemakaian bahasa	27	28	30	85	28,33	94,44	Sangat Layak
	Rata-rata					21,20	87,72	Sangat Layak

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan penilaian yang diberikan oleh para ahli terhadap modul adalah sangat layak dengan persentase 87,72. Artinya, ahli memberikan

penilaian yang positif terhadap modul yang dikembangkan, baik dari segi tampilan/daya tarik modul, langkah-langkah pelaksanaan modul, peran guru BK atau konselor, materi modul, serta pemakaian bahasa. Modul dinilai dapat diimplementasikan oleh guru BK atau konselor dalam memberikan layanan konseling dan dapat dipakai oleh siswa di SMP untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hasil penilaian berkenaan dengan produk penelitian yang dikembangkan, maka dilakukan uji statistik untuk mengetahui apakah terdapat keselarasan penilaian antar masing-masing validator berkenaan dengan isi modul. Analisis yang peneliti gunakan adalah Uji Signifikansi Konkordansi Kendall. Berikut hasil pengolahan data dengan memanfaatkan program SPSS version 16.

Tabel 5. Hasil Perhitungan Uji Signifikansi Konkordansi Kendall terhadap Ahli

Aspek	Mean Rank	Kendall's W	χ2hitung	χ2tabel	Asymp. Sig
1	14.55				
2	9.86				
$\frac{2}{3}$	13.00				
4	15.27				
5	17.91				
6	12.68				
7	11.86				
8	12.41	0.4.45	2	(db = 23)	
9	12.05	0,145	36,666	35,17	0,035
10	12.41				
11	9.23				
11 12	9.23				
13	15.09				
14	8.82				
15	9.14				
16	10.59				
17	12.36				
18	15.50				
19	12.68				
20	10.00				
21	11.09				
22 23 24	15.32				
23	15.18				
24	13.77				

Jumlah N sebagai item yang dinilai yaitu sebanyak 24. Jika N lebih besar dari 7, dilakukan uji signifikansi W dengan menggunakan pendekatan distribusi chi-square (χ 2) dengan db = N-1 (Siegel, 1990: 292). Untuk itu perlu ditemukan harga χ 2 dengan memanfaatkan hasil perhitungan SPSS Version 16.

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa harga chi- square hitung > harga chi- square tabel (36,666 > 35,17) pada α = 0,05 (db= N-1). Hal ini berarti bahwa terdapat keselarasan penilaian antar ahli terhadap produk yang dinilai.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penilaian yang diberikan oleh para ahli menunjukkan bahwa desain modul yang dikembangkan dinyatakan layak untuk diterapkan oleh narasumber Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para ahli sepakat mengenai kelayakan modul yang disusun. Dari hasil uji statistik jika dikaitkan dengan skor rata-rata sebesar 98,818 berada pada kategori penilaian layak, dapat dimaknai bahwa terdapat keselarasan/kesesuaian penilaian yang positif dari sebelas ahli terhadap produk penelitian yang dikembangkan.

Tabel 6. Data Hasil Keterpakaian

No	Aspek	Skor	Skor Narasuber					Σ	Rata- rata Kategori	
	-	A	В	С	D	Е	F			_
1	Perencanaan	13	10	12	12	10	14	71	11,8	Tinggi
2	Pelaksanaan	31	29	27	28	25	29	169	28,2	Tinggi
3	Evaluasi	20	17	22	19	15	17	110	18,3	Tinggi
	Rata-rata								58,33	Tinggi

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan penilaian yang diberikan oleh narasumber kegiatan musyawarah Guru bimbingan dan konseling terhadap keterpakaian modul adalah tinggi dengan rata-rata skor 58,33. Artinya, narasumber kegiatan musyawarah Guru bimbingan dan konseling memberikan penilaian yang positif terhadap hadirnya modul sebagai media dalam memberikan pelatihan. Narasumber kegiatan musyawarah Guru bimbingan dan konseling dapat menggunakan modul dengan baik yang dapat dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berada pada kategori keterpakaian tinggi.

Selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hasil penilaian berkenaan dengan produk penelitian yang dikembangkan, maka dilakukan uji statistik untuk mengetahui apakah terdapat keselarasan penilaian antar masing-masing narasumber kegiatan musyawarah Guru bimbingan dan konseling berkenaan dengan keterpakaian modul. Analisis yang peneliti gunakan adalah Uji Signifikansi Konkordansi Kendall. Berikut hasil pengolahan data dengan memanfaatkan program SPSS version 16.

Tabel 7. Hasil Perhitungan Uji Signifikansi Konkordansi Kendall terhadap Narasumber MGBK

Aspek	Mean Rank	Kendall's W	χ2hitung	χ2tabel			
1	8.58						
2	9.25						
3	6.92						
4	10.33						
5	9.00		26,780				
6	4.00						
7	11.00	0,319		(db = 14) 23,68			
8	8.58						
9	6.17						
10	12.58						
11	8.50						
12	6.58						
13	5.00						
14	5.83						
15	7.67						

Berdasarkan penyajian data pada Tabel 7 tersebut diketahui bahwa jumlah N sebagai aspek yang dinilai yaitu sebanyak 15. Untuk menentukan tingkat keselarasan penilaian ahli, ditempuh dengan menggunakan pendekatan distribusi chi-square dengan db = (N-1).

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa harga chi-square hitung > harga chi-square tabel (26,790 > 23,68) pada α = 0,05 (db = N- 1). Hal ini berarti bahwa terdapat keselarasan penilaian antar narasumber kegiatan musyawarah Guru bimbingan dan konseling terhadap produk yang dinilai. Harga W mengindikasikan penilaian yang diberikan oleh narasumber kegiatan musyawarah Guru bimbingan dan konseling berada pada tingkat hubungan yang kuat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penilaian yang diberikan oleh narasumber kegiatan musyawarah Guru bimbingan dan konseling ditemukan bahwa desain modul yang dikembangkan dinyatakan dapat diterapkan oleh narasumber kegiatan musyawarah Guru bimbingan dan konseling. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada kecocokan/keselarasan penilaian narasumber kegiatan musyawarah Guru bimbingan dan konseling mengenai keterpakaian modul yang disusun. Dari hasil uji statistik jika dikaitkan dengan rata-rata skor 53,33 yang berada pada kategori penilaian tinggi, dapat dimaknai bahwa terdapat keselarasan/kesesuaian penilaian yang positif dari enam narasumber kegiatan musyawarah Guru bimbingan dan konseling terhadap produk penelitian yang dikembangkan.

DISKUSI

Keterampilan Guru Bimbingan dan Konseling Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kerinci dalam Melaksanakan Assesmen

Melalui pengujian secara statistik diperoleh hasil bahwa keterampilan Guru bimbingan dan konseling Kota Pekanbaru dalam melaksanakan assesmen berada pada kategori sedang, dengan rata-rata skor sebesar 93.196. Begitu juga dengan pengujian secara statistik terhadap Guru bimbingan dan konseling Kabupaten Kerinci yang berada pada kategori sedang (S), dengan rata-rata skor sebesar 89.875. Selanjutnya pengujian hipotesis membuktikan bahwa terdapat perbedaan keterampilan Guru bimbingan dan konseling Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kerinci dengan nilai signifikansi sebesar 0.013 atau probabilitas di bawah 0.05 (0.013 ≤ 0.05).

Assesmen dalam bimbingan dan konseling merupakan salah satu kegiatan penting yang harus dilaksanakan oleh Guru bimbingan dan konseling. Assesmen sendiri secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni assesmen tes dan non tes. Khusus untuk assesmen tes dilaksanakan oleh petugas professional yang telah memperoleh lisensi, sedangkan untuk assesmen non tes setiap Guru bimbingan dan konseling wajib memahami cara pelaksanaannya, dimulai dari perencanaan sampai dengan tindak lanjut.

Cournoyer, et al (2011) menjelaskan bahwa kegiatan assesmen merupakan komponen kunci dari praktik konselor karir dan bimbingan, terlepas dari area aktivitas mereka yang spesifik. Selanjutnya Leppma & Jones (2013) mengemukakan bahwa assesmen merupakan komponen mendasar dalam proses konseling. Juhnke (1995) memaparkan bahwa assesmen akan memberikan arah untuk pengentasan masalah yang dialami klien. Walaupun banyak metode dapat digunakan dalam proses assesmen, namun tidak ada metode yang dapat digunakan tersendiri. Hohensil dalam Gladding (2012) mengemukakan bahwa assesmen merupakan komponen integral dari proses konseling yang digunakan di dalam semua tahap konselong dari rujukan sampai tindak lanjut. Assesmen dalam konseling tidak hanya untuk mengungkapkan performa klien, tetapi juga bagaimana latar belakang/sejarahnya, perilaku dan lingkungan (Vace & Loesch, 1987). Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa assesmen merupakan bagian penting dari proses konseling, dijadikan dasar bagi konselor dalam melakukan intervensi masalah, apabila assesmen yang dilakukan tepat maka penggunaan teknik intervensi juga akan tepat, begitu sebaliknya.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa keterampilan Guru bimbingan dan konseling di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kerinci berada pada kategori sedang, yang berarti berada pada rentang pertangahan antara tinggi dan rendah. Tentunya kondisi ini juga tidak diharapkan karena seharusnya seluruh guru bimbingan dan konseling memiliki keterampilan yang tinggi dalam

melaksanakan assesmen non tes. Penelitian yang dilakukan oleh Rofiqah (2016) terkait dengan penguasaan konsep dan praksis assesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah sasaran layanan Guru BK berada pada kategori sedang dengan persentase sebesar 68.75%. Nurrahmi (2015) melalui penelitiannya mengungkapkan bahwa sebagian besar guru BK memiliki kompetensi profesional dan hanya sebagian kecil Guru BK yang menguasai penggunaan alat tes/instrumen dalam BK.7 Martini, Yusmansyah & Utaminingsih (2013) juga mengungkapkan bahwa di lapangan, masih ada Guru BK yang berlatar belakang pendidikan bukan bimbingan dan konseling. Guru BK yang tidak berlatar belakang pendidikan Bimbingan dan konseling kompetensi profesionalnya berada pada kategori kurang baik dengan persentase sebesar 50%. Selanjutnya Ni Luh Putu & Anggan (2013) mengemukakan melalui hasil penelitiannya, bahwa terdapat kesenjangan antara kompetensi profesional guru BK berbasis Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008.

Hasil analisa juga membuktikan bahwa terdapat perbedaan keterampilan melaksanakan assesmen non tes antara Guru bimbingan dan konseling Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kerinci. Setiap pendidik tentunya harus memiliki kompetensi yang memadai guna mencapai tujuan pendidikan. Guru BK merupakan nakhoda pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, semakin ia terampil maka semakin cepat dan mudah tujuan BK dapat tercapai, begitu sebaliknya. Keterampilan guru dipengaruhi oleh beberapa faktor. Walaupun kajian penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi profesional guru BK, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan assesmen belum banyak dilakukan, namun peneliti beranggapan bahwa setiap faktor-faktor yang menentukan keterampilan pendidik itu sama.

Ullah, Farooq & Memon (2008) mengemukakan melalui penelitiannya bahwa keterampilan mengajar dapat ditanamkan melalui program pendidikan guru yang efektif. Selanjutnya Wikana (2008) juga mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi kemampuan mengajar guru terdiri atas faktor internal, yaitu latar belakang pendidikan, kepribadian, pengelolaan kelas, pengalaman mengajar, penguasaan metode, dan kesadaran waktu. Faktor eksternal ialah, karakteristik siswa, fasilitas fisik, mata pelajaran, dan lingkungan sekolah. Selanjutnya Darsih (2017) menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengembangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi guru. Menurut Hanafi & Yuliani (2006), faktor sikap, inisiatif, kreatifitas, inovasi sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan kurikulum karena pendekatan dan metode yang digunakan beragam, bersifat kontektual dan guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Selanjutnya melalui hasil penelitiannya Yuliani (2016) menjelaskan bahwa Iklim organisasi dan sikap perpengaruh terhadap profesional guru. Ismail (2015) juga menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan

salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Senada dengan hasil penelitian tersebut, Rosidah (2017) juga mengemukakan bahwa faktor yang berkontribusi paling tinggi terhadap keterampilan guru adalah faktor Pelatihan.

Tingkat Kelayakan Modul Asesmen Bimbingan dan Konseling non-tes

Produk penelitian yang dihasilkan dalam penelitian ini meliputi modul assesmen non tes. Dalam pengembangan produk ini, penulis mempedomani langkah-langkah yang tertuang dalam ADDIE model, yaitu analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Dari hasil yang disajikan dalam tahap development diketahui bahwa modul yang disusun telah mencapai kriteria sangat layak oleh para ahli.

Nilai kelayakan yang diberikan oleh para ahli tersebut merupakan nilai yang didasari oleh objektifitas terhadap isi/kandungan yang tertuang dalam modul. Objektifitas tersebut dapat dibuktikan dengan melihat hasil pengujian secara statistik dengan menggunakan Uji Signifikansi Koefisien Konkordansi Kendall. Dari hasil pengujian tersebut diketahui bahwa tingkat keselarasan penilaian yang diberikan mengindikasikan hubungan yang kuat antar ahli.

Aspek tampilan/daya tarik dari modul yang disusun menarik. Artinya, tampilan dari modul yang dikembangkan tersebut dapat menarik minat pengguna untuk membahas materi di dalamnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Dimyati (1999) bahwa isi pelajaran dalam bentuk warna, suara, gerak dan bentuk dapat membangkitkan perhatian siswa. Selanjutnya untuk aspek langkah- langkah pelaksanaan modul yang dikembangkan dapat dioperasionalkan oleh narasumber. Narasumber dapat memanfaatkan modul yang dikembangkan. Selanjutnya materi modul yang dikembangkan mudah dipahami baik oleh narasumber dan Guru BK. Hal ini sesuai dengan karakteristik modul menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (2018) yaitu modul hendaknya memenuhi kaidah user friendly atau bersahabat/ akrab dengan pemakainya. Setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, serta menggunakan istilah yang umum digunakan, merupakan salah satu bentuk user friendly.

Di samping itu, penilaian yang diberikan oleh ahli terkait 5 aspek, yaitu tampilan/daya tarik, langkah-langkah pelaksanaan modul, peranan narasumber, materi, dan pemakaian bahasa tidak ada yang menunjukkan penilaian yang di bawah standar kelayakan. Hal ini semakin menguatkan bahwa modul assesmen non tes layak untuk dimanfaatkan.

Lebih jauh, modul yang telah divalidasi oleh para ahli semakin baik setelah mendapatkan penilaian dari narasumber selaku pengguna. Hal ini dapat dimaknai bahwa modul yang

dikembangkan telah memperlihatkan hasil yang sangat baik untuk dapat diterima dan dimanfaatkan oleh narasumber. Dengan demikian keseluruhan bagian produk penelitian yang dinilai telah dinyatakan baik dan sesuai untuk digunakan di kegiatan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling.

Secara umum, modul assesmen non tes yang disusun juga telah mencapai taraf keterpakaian yang memadai. Untuk aspek perencanaan dapat dilakukan oleh narasumber dengan baik. Segala alat yang dibutuhkan untuk penggunaan modul dapat disediakan oleh narasumber. Selanjutnya aspek pelaksanaan menunjukkan bahwa narasumber dapat mengikuti langkahlangkah yang telah disusun. Berikutnya aspek evaluasi yang digunakan sudah mampu melihat perolehan Guru BK yang mengikuti pelatihan. Hal tersebut relevan dengan pendapat Dharma (2008) yang menyatakan bahwa modul sebagai alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Penggunaan modul ini juga akan mengarahkan Guru BK untuk menemukan konsep sendiri sehingga pelatihan dengan menggunakan modul akan lebih terfokus pada Guru BK sedangkan narasumber hanya berfungsi sebagai fasilisator.

REFERENSI

- Ahmadi, Abu & Rohani, Ahmad. (1991). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Agus Winarno dan Nanik Prihartanti. (2013). "Peranan Musyawarah Guru Pembimbing (MGP) dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Pembimbing SMP Kabupaten Boyolali". *Jurnal Penelitian Humaniora*, 14 (1): 71-84.
- Ardimen dan Zuwirda. "Implementasi Program Musyawarah Guru BK (MGBK) SLTP Kabupaten Lima Puluh Kota". Makalah disajikan pada Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dan Konsorsium Keilmuan BK di PTKI Batusangkar, 28 29 November 2015.
- Asep Agus Sulaeman. "Peran Program Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPA dalam Meningkatkan Kompetensi Guru IPA". Makalah disajikan pada Seminar Nasional Pendidikan Sains USKW Universitas Kristen Satwa Wacana Tahun 2015.
- Borg, Walter. R. & Gall, Meredith. D. (1989). Educational research: an Introduction. New York: Longman.
- Cournoyer, Louis et al. (2011). "Assessment Guide for Career and Guidance Counselling", Ordre Des Conseillers et Conseilleres d'orientation Du Quebec partnership with the Canadian Education and Research Institute for Counseling.

- Darsih, Try Santi Kisria. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Profesional Guru Akuntansi pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Langkat dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderating, *Tesis tidak diterbitkan*, Medan, Universitas negeri Medan.
- Dharma, Surya. (2008). Penulisan Modul Kompetensi Penelitian dan Pengembangan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Dimyati & Mudjiono. (1999). Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Profesi Pendidik Depdiknas RI. (2008). Standar *Pengembangan Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. (2008). *Teknik Penyusunan Modul*. Jakarta: Depdiknas.
- Eka Selvi Handayani. (2016). "Studi Tentang Kontribusi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PKN pada Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Bidang Studi PKN di SMA Negeri 2 Samarinda". *Jurnal Pendas Mahakam, 1* (1): 10-22.
- Firman. (2015). "Peranan MGMP Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA di Kota Balikpapan". *Jurnal Sains Terapan*, 1 (2): 27-33.
- Gladding, Samuel T. (2012). Konseling Profesi Yang Menyeluruh. Jakarta: Indeks.
- Hamalik, Oemar. (2002). Psikologi belajar dan Mengajar. Bandung. Sinar Baru Algensindo.
- Hanafi, Agustina & Yuliani, Indrawati. (2006). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru Matematika dalam Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada Sekolah Menengah Atas Kota Palembang", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 4 (7): 2-19.
- Hayati, I., & Sujadi, E. (2018). Perbedaan Keterampilan Belajar Antara Siswa IPA dan IPS. *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan, 14* (1), 1-10. doi:10.32939/tarbawi.v14i1.250
- Ismail. (2015). "Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru PAI dalam Pembelajaran", *Jurnal Mudarrisuna*, 4 (2): 704-719.
- Juhnke, Gerald A. (1995). "Mental Health Counseling Assessment: Broadening One's Understanding of the Client and the Clients Presenting Concerns". *EDO-CG*-95-3: 1-2.
- Leppma, Monica & Jones, Karyn Dayle. (2013). "Multiple Assessment Methods and Sources in Counseling: Ethical Consideration". Ideas and Research You Can Use, Vistas: 1-12.
- Maria Evangeli Onate & J.T Lobby Loekmono. (2016). "Evaluasi Program Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling SMP/MTS Kota Salatiga Tahun 2012 2015". *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3 (2): 294-309.
- Martini, Suci., Yusmansyah., Utaminingsih, Diah. (2013). "Analisis Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling pada SMA Negeri Se-Kota Metro". *Alibkin, 2* (2): 1-13.
- Mulyasa, E. (2004). Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mustofa. (2007). "Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia". *Jurnal Ekonomi & Pendidikan, 4* (1): 76-88.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (1996). Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bina Aksara.
- Ni Luh Putu Suastini, Anggan Suhandana I Made Yudana. (2013). "Analisis Kesenjangan Kompetensi Profesional Guru BK Berbasis Permendiknas No.27 Tahun 2008 (Studi Pada Para Guru BK SMA Se-Kabupaten Tahun 2013)". e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, 4.
- Nurrahmi, Hesty. (2015). "Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling". *Jurnal Al Hikmah*, 9 (1): 45-55.
- Nurhamidah. (2010). "Kesiapan Siswa untuk Konseling Perorangan dan Peran Guru pembimbing di Sekolah Menengah Atas (SMA) 7 Padang". *Tesis* tidak diterbitkan. Padang: PPs UNP.
- Peterson, Wikana. (2008). "Deskripsi Kemampuan Mengajar Guru dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya". *Tesis* tidak diterbitkan, Surabaya, Universitas Surabaya
- Prayitno. (2009). Wawasan Profesional Konseling. Padang: Universitas Negeri Padang.
- . (2013). Pembelajaran Melalui Pelayanan BK di Satuan Pendidikan. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Prayitno & Erman Amti. (2004). Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ridwan. (2014). "Upaya-Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru dalam Proses Belajar Mengajar". *Jurnal Pendidikan Ekonomi IKIP Veteran Semarang*, 2 (1): 83-95;
- Rofiqah, Tamama. (2016). "Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling dan Upaya Pembinaan". *Jurnal Forum Pendidikan, 36*: 1-11.
- Rosidah. (2017). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Profesional Guru Di Mi Ma'arif Bego Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta". *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta, UIN Sunan Kaligaja.
- Santyasa, I Wayan. 2009. "Metode Penelitian Pengembangan dan Teori Pengembangan Modul". Makalah disajikan dalam Pelatihan Bagi Para Guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di Kecamatan Nusa Peninda Kabupaten Klungkung, Pusat Penelitian Universitas Pendidikan Ganesha, Klungkung, 12-14 Januari.
- Sudjana, Nana & Ahmad Rivai. (2001). Teknologi Pengajaran. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sujadi, E. (2017). Penerapan Pendidikan Karakter Cerdas Format Kelompok Untuk Meningkatkan Nilai Kejujuran Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam (BKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. *Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan, 13* (1), 97-108
- Sujadi, Eko., Ayumi, Rinda Tri., Indra, Syaiful., Sumarto., Rahima, Raja. 2018). Layanan Konseling Kelompok dengan Menggunakan Pendekatan Cognitive Behavioral untuk Membentuk Internal Locus of Control. *Jurnal Fokus Konseling*, 4 (2): 176-184.

- Sujadi, Eko. (2019). Penerapan Play Therapy dengan Menggunakan Permainan Tradisional untuk Meningkatkan Keterampilan Sosio Emosional. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan, 3* (1): 14-24. doi: 10.30598/jbkt.v3i1.892
- Suryosubroto. (1983). Sistem Pengajaran dengan Modul. Yogyakarta: PT. Bina Aksara.
- Tutik Yuliani. (2016). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profesionalisme Guru MTS Negeri di Balikpapan Timur", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 4* (2): 120 -125
- Ullah, S. Z., Farooq, M. S., & Memon, R. A. (2008). "Effectiveness of Teacher Education Programmes in Developing Teaching Skills for Secondary Level." *Journal of Quality and Technology Management*, 33-38.
- Vembriarto. (1981). Pengajaran Modul. Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Paramita.
- Walgito, Bimo. (2004). Bimbingan dan Konseling. Yogyakarta. Andi Offset.
- Willis, Sofyan S. (2004). Konseling Individu. Bandung. Alfabeta.